



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

SURAT KEPUTUSAN WALIKOTA NOMOR 105 TAHUN 2025

TENTANG

**PERUBAHAN
RENCANA KERJA
PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG**

TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena kehendak-Nya Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 dapat diselesaikan.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang berperan penting dalam mendukung dan mencapai tujuan Pemerintah Kota Padang Panjang yang tertuang dalam RPD tahun 2024-2026.

Sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang dijabarkan lebih lanjut dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, dalam rangka penyusunan dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang perlu adanya koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan, baik pembangunan nasional, pembangunan daerah maupun antar daerah, sehingga akan dicapai keselarasan dan keharmonisan dalam sistem perencanaan pembangunan yang terintegrasi.

Kami menyadari bahwa Perubahan Rencana Kerja (RENJA) ini masih jauh dari sempurna oleh karena itu kami mengharapkan pihak-pihak terkait dapat memberikan saran untuk penyempurnaan Perubahan Renja ini. Kepada semua pihak yang telah membantu penyelesaian Perubahan Renja ini kami ucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

KOTA PADANG PANJANG



YAN KAS BARI, SE

NIP. 196801131994011001

DAFTAR ISI

Har

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2025

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Maksud dan Tujuan	5
1.4 Sistematika Penulisan	5
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025	7
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan I Tahun 2025	7
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
2.3 Penentuan Isi Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	23
2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD	28
2.5 Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Masyarakat	38
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN	39
3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi	39
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	41
3.3 Program dan Kegiatan	44
BAB IV PENUTUP	50

DAFTAR TABEL

Table 2.1	Evaluasi Terhadap Hasil Renja Perangkat Daerah Periode Pelaksanaan s.d Triwulan I Tahun 2025	8
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan (Indikator Capaian Program) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 s.d Triwulan I Tahun 2025 .	23
Tabel 2.3	Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang	29
Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang	43
Tabel 3.2	Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pohon Masalah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang	
	Panjang	27

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1), perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila hasil evaluasi pelaksanaan pada tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan. Ketidaksesuaian ini mencakup perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, keuangan daerah, serta rencana program dan kegiatan RKPD, atau adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih dari tahun sebelumnya harus digunakan pada tahun berjalan. Dalam konteks ini, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang telah membuat perubahan Renja Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan tantangan aktual dan mendukung Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 serta Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026.

Perubahan Renja 2025 dilakukan sebagai respons terhadap perubahan lingkungan operasional yang memengaruhi tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Evaluasi pelaksanaan Renja tahun berjalan mengidentifikasi sejumlah isu strategis yang menuntut penyesuaian agar tetap relevan dengan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan daerah. Perubahan ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang menekankan pentingnya keselarasan antara rencana kerja dengan dinamika perkembangan keadaan.

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang telah merevisi Rencana Kerja (Renja) Tahun 2025 untuk menyesuaikan dengan tantangan yang muncul dan memastikan keselarasan dengan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Revisi ini sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (1), yang mengizinkan perubahan RKPD dan Renja apabila evaluasi pelaksanaan tahun berjalan menunjukkan ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, seperti prioritas pembangunan daerah atau kebutuhan penggunaan saldo anggaran tahun

sebelumnya.

Berdasarkan evaluasi Renja tahun berjalan, teridentifikasi sejumlah isu strategis yang menjadi dasar revisi:

1. Bidang Perpustakaan

Pesatnya perkembangan teknologi informasi mendorong diversifikasi layanan perpustakaan umum. Masyarakat kini menuntut layanan yang lebih proaktif, seperti layanan jemput bola, akses digital, serta penyediaan informasi cepat dan relevan, di samping layanan peminjaman bahan pustaka konvensional.

2. Bidang Kearsipan

Tantangan utama meliputi rendahnya kesadaran Perangkat Daerah dalam pengelolaan arsip yang baik dan kompetensi arsiparis yang terbatas. Hal ini memengaruhi efisiensi dan akurasi pengelolaan data pemerintahan.

Perubahan Renja 2025 merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026 dan dirancang untuk mendukung peran strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dalam meningkatkan literasi masyarakat, mengelola informasi secara efektif, dan memastikan tata kelola kearsipan yang baik. Dengan demikian, revisi ini berkontribusi pada pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 didasarkan pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang relevan, yang mencakup :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 4);
6. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2024 Tentang Kota Padang Panjang di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6975);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan APBN dan APBD Tahun Anggaran 2025;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Padang Panjang Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2013 Nomor 2 Seri E.1);
15. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9);
16. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
17. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2023 Nomor 6);
18. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
19. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
20. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 105 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2025 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan adalah:

1. Sebagai pedoman pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, pendanaan indikatif, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran Tahun Anggaran 2025;
2. Sebagai salah satu bahan penyempurna dalam penyusunan rancangan Perubahan RKPD Kota Padang Panjang tahun 2025;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun Anggaran 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025

Mereview terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan I tahun 2025, Analisis kinerja pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

Memuat Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun 2025 dan Perkiraan Maju tahun 2026.

BAB IV PENUTUP

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan I Tahun 2025

Kualitas Renja Perangkat Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja Perangkat Daerah yang berkualitas diperlukan adanya review terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun berjalan, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun tahun sebelumnya. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan/permasalahan yang dihadapi.

Dalam melakukan penyusunan Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, perlu diperhatikan perbandingan hasil evaluasi capaian kinerja pada Renja Tahun 2025 Triwulan 1

1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan. Begitu juga berdasarkan hasil revidi berdasarkan target kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2024-2026.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Triwulan 1 Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 2.1 berikut ini:

Tabel 2.1
EVALUASI TERHADAP HASIL RENJA PERANGKAT DAERAH
RENJA PERANGKAT DAERAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG
PERIODE PELAKSANAAN S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Sasaran	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program(outcome/Kegiatan(output)	Target Renstra Perangkat Daerah pada Tahun 2024 (akhir periode Renstra Perangkat Daerah)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra Perangkat Daerah sampai dengan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024		Target Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Realisasi Kinerja Pada Triwulan		Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja Perangkat Daerah yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025		Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Rens Perangkat Daerah s/d Tahun 2025 (%)		Unit Peran at Daera Penat gung jawab			
										K	Rp										
				K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	15			
1.	Meningkatn Minat Baca Masyarakat		Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	87	4,380,738,682	96.78	4,882,206,522	96,80	5,827,446,150		1,177,891,096	0	1,177,891,096	96.	6,060,097,618	111%	138%	DPK			
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100	%	3,659,464,682	100	%	4,404,395,251	100	%	4,396,873,900	25	1,011,085,761	25	1,011,085,761	125	5,415,481,012	125%	148%	DPK

		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	95	%	2,799,779,682	100	%	3,491,202,053	95	%	3,299,338,919	24	854,789,291	24	854,789,291	124	4,345,991,344	129%	155%	DPK
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	364	Orang/bulan	2,799,779,682	26	Orang/bulan	3,491,202,053	364	Orang/bulan	3,299,338,919	104	854,789,291	104	854,789,291	130	4,345,991,344	100%	155%	DPK
		Administrasi Kepagawayaan Perangkat Daerah	Persentase jumlah pakaian dinas yang diadakan	100	%	13,000,000	100	%	13,000,000	0	%	-		-	0	-	100	13,000,000	100%	100%	DPK
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan	26	Paket	13,000,000	26	Paket	13,000,000	0	Paket	-		-	0	-	26	13,000,000	140%	100%	DPK

		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90	%	199,605,000	100	%	224,373,159	90	%	138,476,831	24	11,636,955	24	11,636,955	124	236,010,114	138%	118%	DPK
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	Paket	6,605,000	8	Paket	3,623,800	4	Paket	4,522,300		-	0	-	8	3,623,800	140%	55%	DPK
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4	Paket	33,000,000	25	Paket	27,135,588	4	Paket	25,866,531	1	50,000	1	50,000	26	27,185,588	200%	82%	DPK
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	10,000,000	7	Paket	10,236,600	4	Paket	9,342,000	1	175,000	1	175,000	8	10,411,600	200%	104%	DPK

		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24	Laporan	150,000,000	200	Laporan	183,377,171	24	Laporan	98,746,000	6	11,411,955	6	11,411,955	200	194,789,126	44%	130%	DPK
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	0	%	-	0	%	-	100	%	15,000,000	0	-	-	-	0	-	0%	0%	DPK
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	0	Unit	-		Unit	-	1	Unit	15,000,000		-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah yang terpenuhi	90	%	502,080,000	100	%	525,306,971	90	%	691,383,150	24	135,397,115	24	135,397,115	124	660,704,086	138%	132%	DPK

		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	6,000,000	2	Laporan	1,000,000	12	Laporan	785,800	1	300,000	1	300,000	3	1,300,000	100%	22%	DPI
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48	Laporan	48,000,000	60	Laporan	25,604,422	48	Laporan	27,795,350	12	4,515,187	12	4,515,187	72	30,119,609	125%	63%	DPI
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	448,080,000	16	Laporan	498,702,549	12	Laporan	662,802,000	4	130,581,928	4	130,581,928	20	629,284,477	100%	140%	DPI
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkategori baik	80	%	145,000,000	100	%	150,513,068	80	%	252,675,000	20	9,262,400	20	9,262,400	120	159,775,468	150%	110%	DPI

		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1	Unit	5,000,000	11	Unit	118,461,818	1	Unit	53,140,000	1	3,159,000	1	3,159,000	12	121,620,818	217%	2432%	DPK
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10	Unit	85,000,000	0	Unit	-	10	Unit	137,435,000	3	5,722,400	3	5,722,400	3	5,722,400	217%	7%	DPK
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46	Unit	22,000,000	46	Unit	14,165,000	46	Unit	22,400,000	1	381,000	1	381,000	47	14,546,000	102%	66%	DPK
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	Unit	33,000,000	3	Unit	17,886,250	3	Unit	39,700,000		-	0	-	3	17,886,250	167%	54%	DPK

		PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Jumlah anggota pustaka	3200	Orang	696,274,000	3678	Orang	477,811,271	3325	Orang	1,329,195,200	3741	152,555,975	3741	152,555,975	741	630,367,246	100%	91%	DPK
		Pengelolaan Perpustakaan Tingkat daerah kabupaten/ Kota	Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	31000	Orang	354,388,000	37418	Orang	283,471,366	32000	Orang	392,754,450	2722	8,406,450	2722	8,406,450	401	291,877,816	129%	82%	DPK
		Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	4	Perpustakaan	43,200,000		Perpustakaan	-		Perpustakaan	-		-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan		Dokumen	-	-	Dokumen	-	50	Dokumen	48,622,850	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK

		Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah bahan Perpustakaan tercetak yang dicetak dan diadak	500	Eksemplar	35,000,000	786	Eksemplar	107,386,200	0		-	0	-	0	-	786	107,386,200	0%	0%	DPK
		Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan unt Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	500	Eksemplar	276,188,000	786	Eksemplar	176,085,166	700	Eksemp	175,679,700	125	8,406,450	125	8,406,450	911	184,491,616	0%	67%	DPK
		Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Kabupaten/Kot	Jumlah koleksi Perpustakaan khas daer tingkat kabupaten/kota yang dikembangkan		Eksemplar	-	0	Eksemplar	-	145	Eksemp	158,471,900	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK

		Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah layanan Perpustakaan elektronik yang dikembangkan dengan manajemen TIK		Perpustakaan	-	0	Perpustakaan	-	1	Perpustakaan	9,980,000	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase minat baca masyarakat	59	%	341,886,000	72.47	%	194,339,905	60	%	936,440,750		144,149,525		144,149,525	72.	338,489,430	123%	99%	DPK
		Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	4	Perpustakaan	74,071,800	5	Perpustakaan	36,825,780	6	Perpustakaan	101,892,700	1	3,000,000	1	3,000,000	6	39,825,780	100%	54%	DPK
		Pembangunan dan pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah sarana Perpustakaan yang dibangun dan dipelihara di tempat-tempat umum yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/Kota		Perpustakaan	-		Perpustakaan		1	Perpustakaan	39,750,000	2	30,325,000	2	30,325,000	2	30,325,000	0%	0%	DPK

		Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	Jumlah orang yang mendapatkan penghargaan gerakan budaya gemar membaca tingkat kabupaten/kota		Orang	-		Orang		9	Orang	463,328,850	0	-	0	-	0	-	0%	0%	DPK
		Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68	Lokus	267,814,200	68	Lokus	157,514,125	68	Lokus	331,469,200	10	110,824,525	10	110,824,525	78	268,338,650	0%	100%	DPK
		PROGRAM PELESTARIAN NASKAH KUNO MILIK DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	25	%	25,000,000	0	%	-	33	%	101,377,050		14,249,360	0	14,249,360	0	14,249,360	0%	57%	DPK

		Pelestarian Naskah Ku Milik Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Koleksi naskah kuno	2	Naskah	25,000,000		Naskah	-	3	Naskah	101,377,050	0	14,249,360	0	14,249,360	0	14,249,360	1%	57%	DPK
		Peningkatan Peran Ser Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawat pelestarian, dan pendaftaran Naskah Ku	Jumlah masyarakat yan berperan dalam penyimpanan, perawata pelestarian dan pendaftaran naskah kur	1	Orang	25,000,000	0	Orang	-	100	Orang	101,377,050	1	14,249,360	1	14,249,360	1	14,249,360	1%	57%	DPK
3	Meningkatn penyelamat pembinaan dan penata arsip secara baku di OPI		Rata-rata Nilai LAKI OPI	70,5		117,471,200	83.03		222,895,435	83,08		96,444,510		3,000,000	0	3,000,000	83.	225,895,435	132%	192%	

		PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase OPD yang menerapkan arsip secara baku	50	%	25,000,000	62.50	%	133,664,305	60	%	50,033,450		3,000,000	0	3,000,000	62.50	136,664,305	125%	547%	DPK
		Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kab/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip dinamis		OPD	-	15	OPD	133,664,305	20	OPD	24,999,850		3,000,000	0	3,000,000	15	136,664,305	1%	0%	DPK
		Pengawasan arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota		Laporan	-	23	Laporan	133,664,305	23	Laporan	24,999,850		3,000,000	0	3,000,000	23	136,664,305	1%	0%	DPK
		Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip statis	15	OPD	25,000,000	15	OPD	-	20	OPD	-		-	0	-	15	-	1%	0%	DPK

		Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	23	Laporan	25,000,000		Laporan	-		Laporan	-		-	0		-	0		-	1%	0%	DPK
		Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	0	%	-	0	%	-	60	%	25,033,600		-	0		-	0		-	0%	0%	DPK
		Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN	0	Pengguna	-	0	Pengguna	-	400	Pengguna	25,033,600		-	0		-	0		-	1%	0%	DPK
		PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP LKD	Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000	Dokumen	92,471,200	5996	Dokumen	89,231,130	5000	Dokumen	46,411,060		-	0		-	59%	89,231,130	1%	96%	DPK	

		Perlindungan dan Penyelamatan arsip akibat bencana yang berskala Kab/Kota	Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	50	%	22,000,000	66.67	%	22,531,550	60	%	14,421,260		-	0	-	66.	22,531,550	133%	102%	DPI
		Pemulihan dan Penyelamatan arsip akibat bencana	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15	Arsip	22,000,000	20	Arsip	22,531,550	15	Arsip	14,421,260		-	0	-	20	22,531,550	1%	102%	DPI
		Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	75	%	70,471,200	75	%	66,699,580	75	%	31,989,800		-	0	-	75	66,699,580	100%	95%	DPI

		Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	Jumlah Daftar Autentikasi Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan	1000	Arsip	70,471,200	1,644	Arsip	66,699,580	1000	Arsip	31,989,800		-	0	-	164	66,699,580	1%	95%	DPK
						4,498,209,882			5,105,101,957			5,923,890,660									
Rata - rata capaian kinerja (%)													19.93%	1,180,891,096	19.93%	1,180,891,096		6,285,993,053			

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 didasarkan pada review hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 juga menyajikan perkiraan realisasi capaian Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan s.d Triwulan I Tahun 2025 serta proyeksi realisasi capaian Renstra Tahun 2025 dan tahun 2026. Pencapaian terhadap indikator kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan yang meliputi indikator sasaran, indikator program, SPM, sesuai dengan tabel 2.2 berikut:

Tabel 2.2
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN (INDIKATOR CAPAIAN PROGRAM)
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN TAHUN 2025
S.D TRIWULAN I TAHUN 2025

No	Indikator Tujuan Sasaran	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah		Realisasi Capaian (Tahun) s.d TW I Tahun 2025	Proyeksi (Tahun)		Catatan Analisis
				2024	2025		2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat			59	60	0	59	60	
	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat			86,79	87,05	0	96,80	87,05	
2	Nilai LAKE			80,5	87,5	0	80,5	87,5	
	Rata-rata Nilai LAKI OPD			70,5	71	0	83,08	71	

2.3. Penentuan Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinan Perpustakaan dan Kearsipan

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Perangkat Daerah yang melaksanakan sebagian kewenangan Pemerintah Daerah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan dibidang perpustakaan dan kearsipan disadari bahwa Dinas Perpustakaan dan Kearsipan belum melaksanakan fungsinya secara optimal.

Sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2007 tentang Perpustakaan bahwasanya Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban:

- a. Menjamin penyelenggaraan dan pengembangan perpustakaan di daerah;
- b. Menjamin ketersediaan layanan perpustakaan secara merata di wilayah masing-masing;
- c. Menjamin kelangsungan penyelenggaraan dan pengelolaan perpustakaan sebagai pusat sumber belajar masyarakat;
- d. Menggalakkan promosi gemar membaca dengan memanfaatkan perpustakaan;
- e. Memfasilitasi penyelenggaraan perpustakaan di daerah; dan
- f. Menyelenggarakan dan mengembangkan perpustakaan umum daerah berdasar kekhasan daerah sebagai pusat penelitian dan rujukan tentang kekayaan budaya daerah di wilayahnya.

Selanjutnya dalam Undang-Undang Nomor 43 tahun 2009 tentang Kearsipan dijelaskan bahwa Unit kearsipan pada pemerintahan daerah berada di lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah dan memiliki tugas :

- a. Melaksanakan pengelolaan arsip inaktif dari unit pengolah satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
- b. Melaksanakan pemusnahan arsip dari lingkungan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah;
- c. Mempersiapkan penyerahan arsip statis oleh pimpinan satuan kerja perangkat daerah dan penyelenggara pemerintahan daerah kepada lembaga kearsipan daerah; dan
- d. Melaksanakan pembinaan dan evaluasi dalam rangka penyelenggaraan kearsipan di lingkungannya.

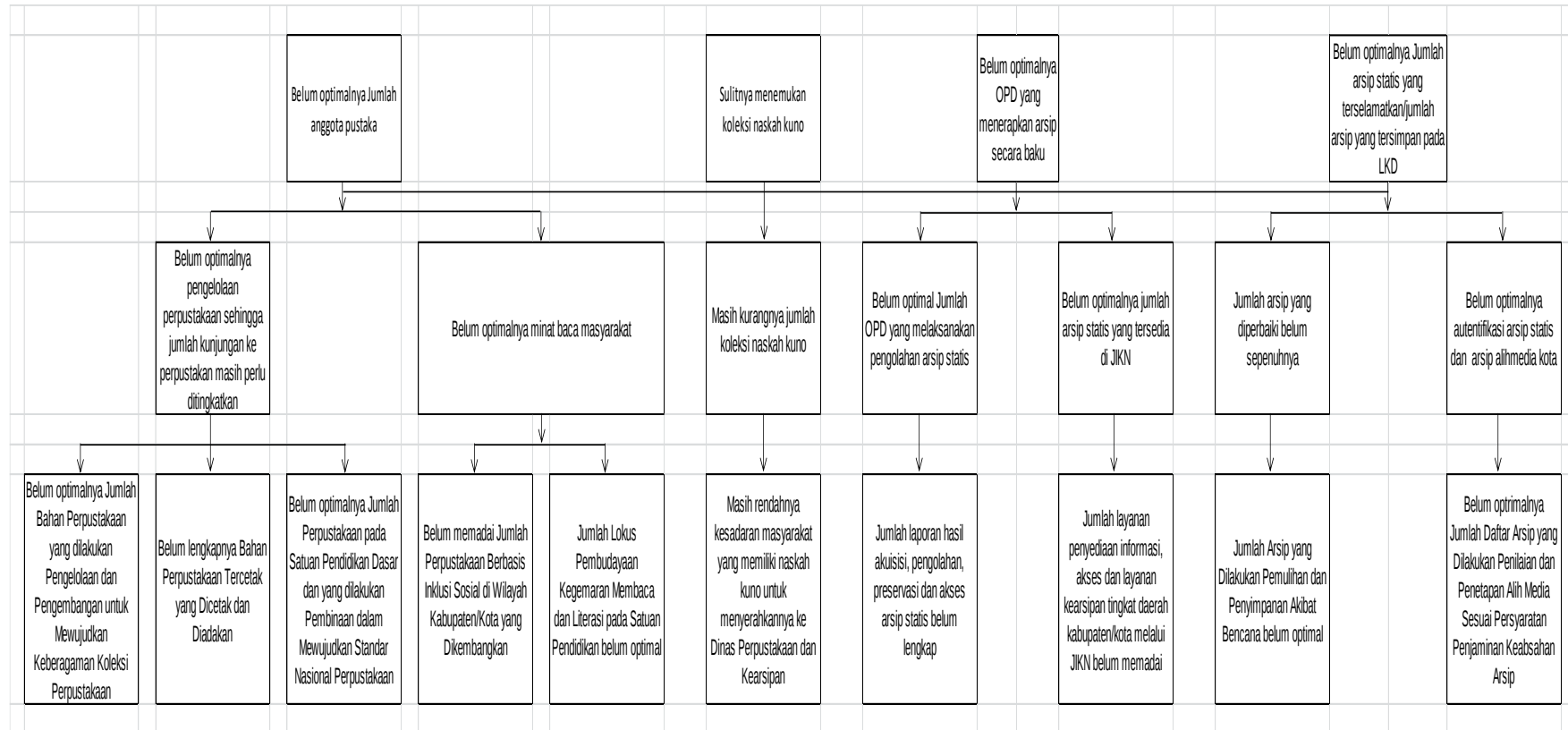
Belum terlaksananya tugas dan fungsi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain:

Pemetaan Permasalahan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Belum optimalnya Jumlah anggota pustaka	Belum optimalnya pengelolaan perpustakaan sehingga jumlah kunjungan ke perpustakaan masih perlu ditingkatkan	Belum optimalnya Jumlah Bahan Perpustakaan yang dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	
			Belum lengkapnya Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicetak dan Diadakan	
			Belum optimalnya Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	
		Belum optimalnya minat baca masyarakat	Belum memadai Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	
			Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan belum optimal	
2.	Sulitnya menemukan koleksi naskah kuno	Masih kurangnya jumlah koleksi naskah kuno	Masih rendahnya kesadaran masyarakat yang memiliki naskah kuno untuk menyerahkannya ke Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
3.	Belum optimalnya OPD yang menerapkan arsip secara baku	Belum optimal Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip statis	Jumlah laporan hasil akuisisi, pengolahan, preservasi dan akses arsip statis belum lengkap	
		Belum optimalnya jumlah arsip statis yang	Jumlah layanan penyediaan informasi, akses dan layanan kearsipan tingkat daerah kabupaten/kota melalui JIKN belum memadai	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
		tersedia di JIKN		
4.	Belum optimalnya Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	Jumlah arsip yang diperbaiki belum sepenuhnya	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana belum optimal	
		Belum optimalnya autentifikasi arsip statis dan arsip alihmedia kota	Belum optimalnya Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	

GAMBAR 2.1
POHON MASALAH DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN
KOTA PADANG PANJANG



2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan disusun dengan mengacu pada rancangan awal Perubahan RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal Perubahan RKPD, untuk lebih jelasnya review terhadap rancangan awal Perubahan RKPD Tahun 2025 Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.3.

Tabel 2.3

Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025

Kota Padang Panjang

Nama Perangkat Daerah: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN				4.527.007.882					4.954.748.652	427.740.770	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR											
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN				4.384.536.682					4.850.805.032	466.268.350	
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 Persen	3.693.264.682	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA		Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan Dan Kearsipan	100 Persen	4.299.940.982	606.676.300	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	95 Persen	2.812.779.682	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan adminstrasi keuangan perangkat daerah	100 Persen	3.228.673.662	- 415.893.980	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	2.812.779.682	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	364 Orang/bulan	3.228.673.662	- 415.893.980	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	223.405.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 Persen	144.153.330	79.251.670	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.605.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	6.161.500	443.500	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	33.000.000	-	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	21.800.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	4 Paket	9.709.600	12.090.400	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	162.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	24 Laporan	95.282.230	66.717.770	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
		Kel/Desa					Kel/Desa					
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	10.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	15.000.000	5.000.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	10.000.000	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1 Unit	15.000.000	5.000.000	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	90 Persen	502.080.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 Persen	688.798.990	186.718.990	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	6.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12 Laporan	1.347.200	4.652.800	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	48 Laporan	48.011.790	11.790	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	448.080.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	639.440.000	191.360.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 Persen	145.000.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Persentase ketersediaan Barang Milik Daerah berkondisi baik	80 Persen	223.315.000	78.315.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	1 Unit	53.140.000	8.140.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	45.000.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	10 Unit	125.285.000	80.285.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	22.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	46 Unit	24.890.000	2.890.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	33.000.000	Pemeliharaan/R rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	70.000.000	37.000.000	
2.	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	641.272.000	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN		Jumlah anggota pustaka	3325 Orang	500.864.050	140.407.950	
	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	382.622.000	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kunjungan ke Perpustakaan	32000 Orang	242.216.500	140.405.500	
	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	48.500.000	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	- Kota Padang Panjang, Padang Panjang Timur, Tanah Pak Lambik	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	5 Perpustakaan	48.495.000	5.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	700 Eksemplar	35.000.000	Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan Tercetak yang Dicitak dan Diadakan	-	-	35.000.000	
	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 Eksemplar	299.122.000	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	700 Eksemplar	193.721.500	105.400.500	
	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase minat baca masyarakat	60 Persen	258.650.000	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Persentase minat baca masyarakat	60 Persen	258.647.550	2.450	
	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	200.000.000	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	68 Lokus	199.997.800	2.200	
	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	58.650.000	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	6 Perpustakaan	58.649.750	250	
3	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN		Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	33 Persen	50.000.000	PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN		Persentase peningkatan koleksi naskah kuno	33 Persen	-	50.000.000	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	NASKAH KUNO					NASKAH KUNO						
	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koleksi naskah kuno	3 Naskah	50.000.000	Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Koleksi naskah kuno	3 Naskah	-	50.000.000	
	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian dan Pendaftaran Naskah Kuno	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	50.000.000	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	1 Orang	-	50.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				142.471.200	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN				103.943.620	9.000	
4	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barked	50 Persen	50.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP		Persentase OPD yang menerapkan arsip secara barked	50 Persen	50.009.000	9.000	
	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip statis	20 OPD	25.000.000	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah OPD yang melaksanakan pengolahan arsip statis	20 OPD	25.000.000	-	
	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	23 Arsip	25.000.000	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akuisisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	23 Arsip	25.000.000	-	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	60 Persen	25.000.000	Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota		Persentase jumlah arsip statis yang telah tersedia di JIKN	60 Persen	25.009.000	9.000	
	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400 Pengguna	25.000.000	Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN	400 Pengguna	25.009.000	9.000	
5	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	92.471.200	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP		Jumlah arsip statis yang terselamatkan/jumlah arsip yang tersimpan pada LKD	5000 Dokumen	53.934.620	38.536.580	
	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	50 Persen	22.000.000	Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota		Persentase jumlah arsip yang diperbaiki	50 Persen	21.943.120	56.880	
	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	22.000.000	Pemulihan dan Penyimpanan Arsip Akibat Bencana	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Arsip yang Dilakukan Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	15 Arsip	21.943.120	56.880	
	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip	75 Persen	70.471.200	Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media		Persentase autentifikasi arsip statis dan arsip	75 Persen	31.991.500	38.479.700	

No	Rancangan Awal RKPD 2025					Hasil Analisis Kebutuhan					Selisih	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
			alihmedia kota			Kabupaten/Kota		alihmedia kota				
	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	70.471.200	Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	- Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	1000 Arsip	31.991.500	38.479.700	

2.5. Penelaahan Usulan Program, Kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Perubahan Renja tahun 2025, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan tidak terdapat usulan program, kegiatan dan Subkegiatan Masyarakat yang diperoleh dari Pokok Pikiran DPRD.

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Tema RKP 2025 “Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”

Dalam RKP Tahun 2025 diwujudkan melalui arah kebijakan prioritas pembangunan yang meliputi:

1. Sumber Daya Manusia berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serta penguatan karakter dan jati diri bangsa;
2. Infrastruktur Berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga reformasi pengelolaan sampah;
3. Ekonomi Inklusif dan Berkelanjutan, yang diharapkan mampu menciptakan lapangan kerja berkualitas, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk-produk yang ramah lingkungan;

RKP 2025 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP 2025 digunakan sebagai acuan untuk menyusun RKPD. Arah pembangunan yang termuat dalam RKP dapat menjadi acuan bagi Badan Usaha (BUMN/Swasta) dan *Non-State Actor* untuk berpartisipasi dan berkolaborasi dalam mendukung pencapaian pembangunan nasional.

Berikut adalah kebijakan dan inisiatif utama Provinsi Sumatera Barat yang relevan dengan tugas Dinas Perpustakaan dan Kearsipan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2021-2026
RPJMD Provinsi Sumatera Barat menetapkan peningkatan literasi dan pengelolaan informasi sebagai prioritas pembangunan. Fokus utama meliputi:

- Penguatan literasi masyarakat melalui pengembangan perpustakaan berbasis inklusi sosial.
- Digitalisasi layanan perpustakaan dan kearsipan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi.
- Pelestarian budaya lokal melalui pengelolaan arsip statis, seperti naskah kuno Minangkabau.
- Peningkatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pustakawan dan arsiparis. *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 harus memasukkan program yang mendukung literasi masyarakat, seperti pembinaan perpustakaan sekolah dan desa, serta pelatihan SDM untuk memenuhi standar kompetensi nasional. Program pelestarian budaya lokal juga perlu diperkuat, misalnya melalui dokumentasi kearifan lokal Minangkabau.

2. Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial

Provinsi Sumatera Barat aktif mendukung program nasional Transformasi Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial, sebagaimana ditunjukkan melalui kegiatan Replikasi Mandiri pada 23 Mei 2023. Program ini bertujuan meningkatkan literasi dan kesejahteraan masyarakat, khususnya kelompok marginal (misalnya, masyarakat miskin, anak terlantar, dan komunitas terpencil), melalui layanan perpustakaan yang inklusif, seperti perpustakaan keliling dan Taman Baca Masyarakat (TBM). *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 perlu mengintegrasikan kegiatan yang mendukung inklusi sosial, seperti layanan perpustakaan keliling di kelurahan terpencil atau program literasi untuk kelompok rentan, sesuai dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Community Based Development) yang disebutkan dalam dokumen Renja.

3. Pengembangan Layanan Perpustakaan Digital

Provinsi Sumatera Barat telah memulai transformasi digital melalui pengembangan layanan perpustakaan online dan pendirian Rumah Pustaka Buku Balega di Padang sebagai pusat literasi. Selain itu, provinsi mendorong penggunaan teknologi kecerdasan buatan (AI) untuk meningkatkan literasi dan numerasi, meskipun menghadapi tantangan seperti biaya implementasi dan privasi data. *Implikasi untuk Kota Padang*

Panjang: Renja 2025 dapat mengadopsi pendekatan digital dengan mengembangkan platform perpustakaan digital sederhana atau memperluas akses ke koleksi digital. Namun, keterbatasan anggaran dan kebutuhan pelatihan SDM harus diatasi melalui kemitraan dengan provinsi atau lembaga lain.

4. Pembinaan Kearsipan dan Digitalisasi Arsip

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Provinsi Sumatera Barat menyelenggarakan pembinaan kearsipan, termasuk melalui Rapat Koordinasi Nasional Pengawasan Kearsipan pada 2019. Fokusnya adalah pengelolaan arsip dinamis dan statis, serta percepatan digitalisasi arsip untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Provinsi juga menekankan pelatihan arsiparis untuk memenuhi standar kompetensi nasional. *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 harus memasukkan program digitalisasi arsip, seperti pengembangan sistem informasi arsip berbasis teknologi, dan pelatihan tenaga arsiparis untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan efisien.

5. Promosi Khasanah Arsip dan Literasi Lokal

Provinsi Sumatera Barat mempromosikan pelestarian khasanah arsip lokal, seperti koleksi Irwan Prayitno Corner, dan mendukung literasi berbasis kearifan lokal melalui kegiatan seperti resensi buku, lomba literasi, dan promosi perpustakaan. Hal ini bertujuan memperkuat identitas budaya Minangkabau dan meningkatkan minat baca masyarakat. *Implikasi untuk Kota Padang Panjang*: Renja 2025 dapat mengembangkan program serupa, seperti pengumpulan naskah kuno Minangkabau, dokumentasi kearifan lokal, atau kegiatan promosi literasi berbasis budaya, untuk memperkaya koleksi perpustakaan dan arsip daerah.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Tujuan

Tujuan ditetapkan dengan berpedoman kepada pencapaian kinerja 5 tahun sebelumnya sehingga rumusannya harus dapat menunjukan suatu kondisi

yang ingin dicapai pada masa yang akan datang. Untuk itu tujuan disusunnya Renstra Perangkat Daerah ini adalah guna memperjelas pencapaian sasaran yang ingin diraih oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang

Sasaran

Sasaran merupakan bagian yang integral dalam proses perencanaan strategis organisasi, sehingga harus disusun secara konsisten dengan perumusan tujuan organisasi yang ditetapkan sebagai berikut:

Tabel 3.1
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PADANG PANJANG

SEBELUM				SESUDAH			
No	Tujuan / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya tingkat kegemaran membaca masyarakat	Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	60	1	Meningkatnya kualitas dan akses pendidikan masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	97,88
a	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	96,80	a	Meningkatnya Minat Baca Masyarakat	Nilai Tingkat Kegemaran Membaca Masyarakat	74
2	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku	Nilai LAKE	80,5	b	Meningkatnya Konservasi, Pembinaan dan Penataan Arsip Secara Baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08
a	Meningkatnya penyelamatan, pembinaan dan penataan arsip secara baku di OPD	Rata-rata Nilai LAKI OPD	83,08	c	Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai AKIP Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	68,5

3.3 Program dan Kegiatan

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2025. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025 serta Review Renstra Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Panjang Tahun 2024-2026;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2025.
3. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
4. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang
5. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
6. Sumber-sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.

Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Perubahan Renja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Tahun 2025 sebagaimana table 3.1 berikut:

Tabel 3.2
Perubahan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja PD)
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025

No	Kode Rekening	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Akhir Periode Rens tra OPD	Realisasi Capaian RENJ A OPD Tahun 2023	Prakir aan Capai an Targe t RENJ A OPD Tahun 2024	Capaian Kinerja Dan Kerangka Pendanaan									Kelompok Sasaran	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		OPD
							Target 2025		Pagu Indikatif (Rp)			Lokasi	Sumber Dana	Prioritas			Target	Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah	RKPD 2025	APBD 2025	RKPD Perubahan 2025			Nasional	Daerah				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN							4,954,748,652	5,923,890,660	5,215,021,218							4.465.009.882,00	
	2.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							4,954,748,652	5,923,890,660	5,215,021,218							4.465.009.882,00	
	2.23.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN							4,850,805,032	5,827,446,150	5,199,353,368							4.347.538.682,00	

#	2.23.01.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	100 %		100 %	100 %	100 %	4,349,94 0,982	4,396,87 3,900	4,061,61 3,493							3.736.264. 682,00	
	2.23.01.2.0 2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemuhan n layanan adminstras i keuangan perangkat daerah	100 %		100 %	95%	100 %	3,228,67 3,662	3,299,33 8,919	3,229,82 5,218			-	Meningkat kan kinerja penyeleng garaan pemerintah an daerah yang BerAKHLA K Berorienta si Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			2.812.779. 682,00	DP K
	2.23.01.2.0 2.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2184 oran g		364 orang	364 Orang/b ulan	364 orang	3,228,67 3,662	3,299,33 8,919	3,229,82 5,218	Kota Padang Panjan g, Semua Kecam atan, Semua Kel/Des a	Dana Alok asi Umu m (DAU)	-	Meningkatk an kinerja penyelengg araan pemerintah an daerah yang BerAKHLA K Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal,			2.812.779. 682,00	DP K

															Adaptif dan Kolaboratif				
	2.23.01.2.06.	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	90 %		90 %	90 %	90 %	144,153,330	138,476,831	42,783,050			-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			276.405.000,00	DPK
	2.23.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	24 paket		8 paket	4 Paket	4 paket	6,161,500	4,522,300	1,748,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal,			6.605.000,00	DPK

															Adaptif dan Kolaboratif				
	2.23.01.2.0 6.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	24 paket		25 paket	4 Paket	4 paket	33,000,000	25,866,531	12,002,650	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			33.000.000,00	DP K
	2.23.01.2.0 6.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 paket		7 paket	4 Paket	4 paket	9,709,600	9,342,000	5,783,400	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			21.800.000,00	DP K

	2.23.01.2.0 6.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	144 Laporan		200 Laporan	24 Laporan	24 Laporan	95,282,230	98,746,000	23,249,000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	Dana Alokasi Umum (DAU)	-	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah yang BerAKHLAK Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten Harmonis Loyal, Adaptif dan Kolaboratif			215.000.000,00	DPK
--	-----------------------	--	---	-------------	--	-------------	------------	------------	------------	------------	------------	--	-------------------------	---	---	--	--	----------------	-----

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Padang Panjang Tahun 2025 disusun untuk menyesuaikan program dan kegiatan dengan dinamika perkembangan keadaan, sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Revisi ini berlandaskan evaluasi pelaksanaan Renja Triwulan I Tahun 2025, Rencana Strategis (Renstra) 2024-2026, dan Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Padang Panjang 2024-2026. Dengan pendekatan pembangunan berbasis masyarakat (Community Based Development), Renja ini mengutamakan keterlibatan pemangku kepentingan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) dan mendukung kebutuhan masyarakat.

Perubahan Renja ini menjadi acuan utama dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2025, yang dirumuskan berdasarkan analisis isu strategis, indikator kinerja, dan pagu indikatif sesuai Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Padang Panjang Tahun 2025. Implementasi Perubahan Renja bergantung pada komitmen bersama, koordinasi yang efektif, dan ketersediaan anggaran yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah. Penyesuaian program dan kegiatan dilakukan untuk memastikan relevansi dengan kebutuhan masyarakat serta efisiensi pengelolaan sumber daya.

Dokumen Perubahan Renja ini juga menjadi dasar penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan mendukung akuntabilitas kinerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Dengan sinergi seluruh pihak terkait, Perubahan Renja 2025 diharapkan dapat meningkatkan literasi masyarakat, mengoptimalkan pengelolaan kearsipan, dan berkontribusi signifikan terhadap pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Padang Panjang..

Padang Panjang, 30 Juni 2025
**Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Kota Padang Panjang**



YAN KAS BARI, SE
Pembina Utama Muda NIP. 1968011319940110

